

PENGETAHUAN JURNALISTIK PEGAWAI HUMAS PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PUBLISITAS

Rahmita Saleh, Iqbal Sultan, Muhammad Farid

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar

Abstract

Public relations require skills in journalistic to generating quality publicity. This research aims to describe and analyze the knowledge of journalism public relations employee of South Sulawesi Provincial Government in the publicity activities. This study used a qualitative descriptive approach using the techniques of data collection through in-depth interviews and observations of public relations personnel assigned to conduct publicity activities. Analysis using an interactive model of Huberman and Miles were taken through the stages of data reduction, data display, making conclusions and verification. The results showed that public relations employee of South Sulawesi Provincial Government conduct publicity activities through three stages, namely the coverage of the government's agenda, write and distribute press releases to journalists. Writing a press release is not adjusted to the rules of journalistic writing and the medium. Are loaded in the media have gone through editing stages agenda tailored to each medium, so that the core of the publicity that was sent was not published. This research concluded that government public relations employee of South Sulawesi Provincial Government, in generating publicity decent fit in the mass media, still lack of mastery in terms of expertise and knowledge in the field of journalism.

Keywords : Publicity; Government Public Relations; Press Release

Abstrak

Humas memerlukan kemampuan di bidang jurnalistik agar dapat menghasilkan publisitas yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengetahuan jurnalistik pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan kegiatan publisitas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pegawai humas yang bertugas melakukan kegiatan publisitas. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Huberman dan Miles yang ditempuh melalui tahap reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan publisitas melalui tiga tahap, yaitu peliputan agenda pemerintah, menulis *press release* dan menyebarkan kepada wartawan. Penulisan *press release* tidak disesuaikan dengan kaidah penulisan jurnalistik dan mediumnya. Pemuatannya di media massa telah melalui tahap pengeditan disesuaikan dengan agenda masing-masing media, sehingga inti dari publisitas yang dikirim tidak terpublikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menghasilkan publisitas yang layak di muat di media massa, masih kurang memiliki penguasaan dalam hal keahlian dan pengetahuan di bidang jurnalistik.

Kata Kunci : Publisitas; Humas Pemerintah; Press Release

PENDAHULUAN

Publisitas merupakan informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita (Cutlip, *et al.*, 2009). Publisitas berasal dari sumber-sumber *public relations*

(PR) atau humas, berupa berita dan informasi yang mereka anggap pantas untuk diberitakan, dengan harapan editor dan reporter akan menggunakan informasi tersebut. Untuk menciptakan publisitas, sumber harus tahu informasi apa yang bisa menarik perhatian media, mengidentifikasi

sudut pandang berita yang layak, dan menulis serta mengemas informasi agar sesuai dengan mediumnya.

Dalam konteks *public relations*, untuk menciptakan publisitas, jurnalistik menjadi salah satu bidang atau keahlian yang harus dikuasai oleh seorang humas. Ilmu jurnalistik menjadikan seorang humas paham mengenai proses penyebarluasan informasi, kode etik jurnalis, memaklumi pekerjaan wartawan, paham dunia media, dan mengetahui bagaimana berhubungan dengan media massa. Ilmu atau keterampilan di bidang jurnalistik dibutuhkan untuk keperluan menulis seperti menulis siaran pers (*press release*), brosur, profil perusahaan atau instansi, mengisi media internal dan sejenisnya. Kemampuan menulis diperlukan untuk menghasilkan berita atau informasi yang dapat menjadikan sebuah organisasi dipandang positif oleh publiknya.

Keahlian di bidang jurnalistik akan sangat membantu humas untuk berkomunikasi dengan publik organisasinya, yang tersebar secara geografis dan demografis, dengan memanfaatkan media massa. Demikian juga dengan aktivitas yang dijalankan humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memosisikan dirinya sebagai jembatan antara pemerintah, masyarakat dan media massa. Aktifitas yang mereka lakukan lebih pada kegiatan media dengan memfokuskan kegiatan pada aktivitas jurnalistik mulai dari proses pengumpulan informasi, pengolahan hingga penyebarluasan kepada para awak media. Tetapi, ditengah rutinitas kegiatan jurnalistik yang dilakukan, sangat jarang ditemukan *press release* di media massa yang berasal dari humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan hal itu tidak terlalu berdampak pada semakin baiknya citra pemerintah.

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2012 mengenai peran humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam

membentuk citra pemerintah menunjukkan bahwa peran humas belum dilaksanakan secara optimal karena pencapaian informasi cenderung satu arah. Faktor yang menghambat adalah kemampuan sumber daya manusia, faktor politis, struktur organisasi, infrastruktur yang kurang memadai dan koordinasi antar humas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang belum terjalin dengan baik (Lubis, 2012).

Menyadari pentingnya kegiatan publisitas dan dampak yang bisa ditimbulkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengetahuan jurnalistik pegawai humas kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan kegiatan publisitas, apakah dalam menjalankan kegiatan tersebut telah memiliki penguasaan dalam hal keahlian dan pengetahuan di bidang jurnalistik atau terdapat hal-hal lain yang tidak sesuai dengan konsep jurnalistik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Biro Humas dan Protokol yang bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas pegawai Biro Humas dan Protokol yang melakukan kegiatan publisitas mengenai aktivitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak berarti akan menjadi suatu generalisasi terhadap seluruh kegiatan kumumasan yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah lainnya.

Informan Penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab pada kegiatan publisitas. Informan

berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Publikasi yang juga bertugas sebagai reporter, Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi yang juga bertugas sebagai reporter, satu orang staf humas yang bertugas sebagai Reporter dan delapan orang staf humas yang bertugas sebagai Fotografer.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama masa penelitian yaitu pada bulan April hingga Juni 2014 dengan mengamati langsung aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh pegawai humas, baik aktivitas yang dilakukan di dalam maupun di luar kantor Biro Humas dan Protokol. Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh informan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan data dan kesimpulan dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data lainnya terkait aktivitas jurnalistik yang dibutuhkan dalam penelitian.

Analisis Data

Untuk tahap analisis, penulis melakukan beberapa tahapan. Pertama, menyusun daftar pertanyaan Wawancara berdasarkan unsur-unsur pengetahuan jurnalistik yang akan ditanyakan kepada informan. Kedua, melakukan wawancara. Ketiga, menganalisis hasil wawancara menggunakan model interaktif Huberman dan Miles dengan mereduksi data yang sesuai dengan fokus penelitian tentang pengetahuan jurnalistik dan membuat kategori-kategori tematik dari data yang telah terkumpul, selanjutnya ditarik kesimpulan sementara dan terus

melakukan verifikasi dengan mengumpulkan data baru hingga dapat ditarik kesimpulan yang benar.

HASIL

Ukuran untuk mengetahui pengetahuan jurnalistik yang dimiliki oleh pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan kegiatan publisitas meliputi :

Kualifikasi pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Humas dan Protokol, Andi Darmawan Bintang, pada tanggal 21 April 2014, diketahui bahwa pegawai yang bertugas dalam kegiatan publisitas adalah pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja secara profesional terlepas dari sesuai atau tidak kualifikasi pendidikan formal yang dimiliki. Pengetahuan di bidang jurnalistik dapat diukur dari kualifikasi pendidikan formal bidang Ilmu Komunikasi, belum menjadi standar dalam penerimaan pegawai di Biro Humas dan Protokol.

Hal tersebut diperjelas oleh Kepala Bagian Humas, Devo Khadafi, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2014 dengan menyatakan bahwa :

“Sebenarnya jika dilihat dari pendidikannya, mereka tidak mempunyai basic secara khusus di bidang komunikasi, tetapi mereka umumnya telah lama di bidang kehumasan. Kalaupun ada yang baru, yang saya lihat juga masih kurang yang berlatar belakang keilmuan komunikasi. Tetapi kita tetap memperhatikan skill.”

Mengenai pendidikan formal masing-masing pegawai yang bertugas dalam kegiatan publisitas, dapat dilihat dalam Tabel.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 13 orang pegawai yang bertanggung jawab pada kegiatan publisitas.

Kemampuan menulis berita

Kemampuan menulis berita (*writing competence*), yang dalam kegiatan humas berupa *press release*, meliputi pola penulisan berita dan gaya menulis berita. *Press release* yang ditulis oleh pegawai humas dapat dilihat dalam Gambar. 1. Menurut Kepala Sub Bagian Publikasi, Amrullah Hanafie, dalam wawancara yang dilakukan pada 24 April 2014 :

“Press release yang dikirim ke media tidak dalam format penulisan berita yang sebenarnya, yang penting unsur 5W + 1H ada. Release yang dikirim melengkapi semua data / informasi dari 5W + 1H, tidak dalam bentuk piramida terbalik dan biasanya tidak diberi judul agar informasi itu bisa disesuaikan oleh masing-masing media.”

Tetapi, seorang reporter humas yang sebelumnya pernah bertugas sebagai reporter media cetak, Ibrahim Halim, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 April 2014 mengatakan bahwa pola penulisan berita yang dia gunakan mengikuti format penulisan piramida terbalik yang berisi jawaban pertanyaan 5W + 1H. Menurutnya, pengalamannya sebagai reporter media cetak menjadikan wartawan tidak kesulitan memahami tulisannya sehingga terkadang tulisannya tidak diubah lagi ketika akan di muat di media cetak.

Pemahaman mengenai nilai berita

Mengenai peristiwa, kejadian atau kegiatan yang layak dijadikan berita, pegawai humas yang bertugas sebagai reporter maupun fotografer mengatakan, yang mereka beritakan adalah agenda pemerintah, yaitu agenda Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Liputan yang mereka lakukan sehari-hari seputar agenda pemerintah, dan dari liputan tersebut mereka menyusun berita untuk disebarluaskan kepada wartawan dari

berbagai media massa.

Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi menjelaskan hal tersebut dalam wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut :

“Humas bertugas mengcover semua kegiatan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk mempublikasikan kegiatannya. Teman-teman setiap hari ada yang bertugas untuk agenda Pak Gubernur, Wagub dan Sekda, dan ada juga yang ditempatkan untuk agenda Ketua Tim Penggerak PKK. Selain mengcover kegiatan, kita juga membuat press release, baik untuk kita konsumsi sendiri, tetapi jika tidak ada wartawan yang ikut kita kirimkan press release. Untuk wartawan yang datang meliput, kita cukup memberi laporan atau bahan dari agenda tersebut.”

Wawancara dengan reporter Gubernur lainnya, Ibrahim Halim, pada 21 April 2014, memberi gambaran mengenai kategori peristiwa yang layak dijadikan berita :

“Biasa juga kita mengeksplor fakta-fakta dilapangan menjadi berita, misalnya hal-hal yang tidak penting kita jadikan penting seperti ketika Pak Gubernur kunjungan ke daerah dan menginap, biasanya ada kegiatannya seperti jogging, ngopi, itu semua berita ringan yang tidak penting tetapi menarik. Karena nilai-nilai berita itu kan banyak, ada namanya people news, berita orang, kalau dia tokoh maka apa yang dia buat tentu layak untuk diberitakan.”

Pengetahuan mengenai bahasa jurnalistik

Dalam penulisan jurnalistik, yang harus dipertimbangkan adalah sifat sederhana, jelas dan langsung. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik harus ringkas, mudah dipahami dan langsung menerangkan apa yang dimaksudkan. Dalam hal ini, Kepala Biro Humas dan Protokol memberi

penjelasan dalam wawancara pada 21 April 2014 :

“Kita selalu bekerja secara struktur. Karena bahasa yang saya gunakan adalah bahasa dalam kapasitas saya sebagai Kepala Biro belum tentu berkait dengan bahasa yang patut dimediakan sehingga saya harus memberikan informasi kegiatan Gubernur kepada pegawai yang memang bertanggung jawab untuk membuat release ke media massa. Jadi yang saya kirim adalah informasi berisi 5W + 1H tetapi penulisannya nanti pegawai yang sesuaikan.”

Mengenai proses penyebarluasan informasi, pihak humas membuat *press release* mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah dan diberikan kepada wartawan sebagai informasi untuk disusun di dalam berita yang akan disampaikan kepada redaktur media mereka masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan bahasa jurnalistik maupun pola penulisan berita tidak terlalu diperhatikan oleh pegawai humas karena bagi mereka *press release* yang dikirim masih akan diolah oleh wartawan. Hasil pengamatan penulis juga ditegaskan oleh Kepala Bagian Humas dalam wawancara yang dilakukan pada 7 Mei 2014, dengan mengatakan bahwa:

“Jadi, karena kita yang kebetulan mendampingi Gubernur atau pimpinan, ke daerah misalnya, kemudian teman-teman dari media yang posting tidak bisa ikut, kita kemudian membuat satu format yang kita sepakati dengan media massa dalam bentuk citizen report mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tetapi kadang-kadang juga tidak selalu dalam bentuk citizen report, kadang-kadang juga yang kita kirim dimasukkan dalam beritanya mereka. Biasanya mereka gali lebih dalam tergantung sudut pandang media mereka. Jadi, mereka mengambil bahan mentahnya disini, kemudian mereka olah

lagi, mereka gali lebih dalam lagi informasinya. Biasanya kalau mereka mau informasi yang lebih dalam lagi mereka bertanya “Kak, ini leading sector-nya dinas apa?”, kami kemudian arahkan ke penanggung jawabnya. Jadi, humas ini berfungsi sebagai jembatan antara SKPD, Pemerintah Provinsi dalam hal ini dengan masyarakat, apapun itu.”

Pengetahuan mengenai kategori berita dan karakteristik media

Berdasarkan hasil pengamatan, pihak humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak membeda-bedakan kategori media dan karakteristik media dalam membuat berita. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol dengan mengatakan bahwa :

“Semua media sudah terbagi segmentasinya, kami tahu segmentasi setiap media, tetapi bagi kami release yang kami kirim tidak hanya untuk satu media seperti misalnya Berita Kota, tetapi kami memberi release kepada semua media. Mau diberitakan atau tidak, itu hak masing-masing media.”

Pengetahuan mengenai foto jurnalistik

Mengenai foto jurnalistik, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seluruh fotografer humas, yang mereka pahami mengenai foto jurnalistik adalah dokumentasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Kegiatan tersebut berupa acara peresmian, pelantikan, penandatanganan kerjasama, rapat dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Fotografer humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam aktivitasnya sehari-hari dibagi ke dalam tiga tim, ada yang bertugas sebagai fotografer Gubernur,

Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Foto-foto yang mereka rekam kemudian di kumpul kepada koordinator fotografer, di seleksi dan di kirim ke Bagian Pengolahan Data Elektronik untuk dimuat di website serta di kirim kepada pewarta foto sesuai dengan permintaan.

Pengetahuan mengenai kode etik media

Kode etik media yang diketahui oleh pegawai humas yang bertugas dalam kegiatan publisitas adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pengetahuan mengenai KEJ, khususnya hak jawab dan hak koreksi, dijadikan pertimbangan dalam melakukan penanganan terhadap berita negatif atau berita yang tidak proporsional mengenai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dimuat oleh media massa. Meski begitu, Kepala Biro Humas dan Protokol, Andi Darmawan Bintang, dalam wawancara pada 21 April 2014 menyatakan bahwa :

“Berita negatif tidak selalu harus kami respon karena kadang kami menganggap bahwa pemberitaan tersebut belum tentu harus kami klarifikasi.”

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh reporter Gubernur, Ibrahim Halim, dalam kutipan wawancaranya berikut ini :

“Tapi kadang-kadang juga kita punya pertimbangan sehingga tidak menggunakan hak jawab kalau itu tidak fatal, cukup dia tahu kalau dia salah.”

PEMBAHASAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pegawai humas dalam menghasilkan publisitas yang layak di muat di media massa, masih kurang memiliki penguasaan dalam hal keahlian dan pengetahuan di bidang jurnalistik. Salah satu ukurannya adalah pengetahuan jurnalistik dapat dilihat dari pendidikan formal yang biasanya dipelajari dalam disiplin Ilmu

Komunikasi. Terhadap 13 orang pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan publisitas, hanya terdapat tiga orang yang merupakan sarjana dari disiplin Ilmu Komunikasi. Menurut Effendy (2002), hal tersebut tidaklah terlalu salah. Tetapi, secara teoritis, sarjana Ilmu Komunikasi memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai kehumasan dibandingkan dengan sarjana lainnya.

Ukuran yang kedua adalah mengenai teknik penulisan berita. Dalam konteks *public relations*, berita yang ditulis oleh humas dikenal dengan istilah *press release* atau siaran berita. Secara teknis, dalam memproduksi siaran berita, Moore (2005) mengatakan bahwa sebuah siaran berita harus disiapkan untuk disesuaikan dengan praktek jurnalistik yang baku. Selain itu, karena disebarkan melalui media massa, maka *press release* seharusnya memenuhi persyaratan berita yang biasa disusun oleh para wartawan.

Teknik penulisan menurut Santana (2005) yang umum digunakan adalah piramida terbalik, dimana *lead* atau paragraf pembuka harus mengintisarikan fakta secara prinsipil dan menjawab lima pertanyaan “siapa, apa, dimana, mengapa dan kapan” (5W : *who, what, where, why* dan *when*). Dengan demikian, jika kisahnya dipotong, teras berita tetap mewakili kisah berita yang lengkap karena bagian berita yang kurang penting telah diletakkan pada paragraf setelahnya.

Pada prinsipnya, siaran berita harus ringkas dan faktual (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2007). Jika ada informasi tambahan, dapat dijadikan sisipan sehingga redaktur dapat menggunakannya jika dibutuhkan. Siaran berita juga harus diproses pada kertas ukuran

8 x 11 inci, di atasnya diberi nama perusahaan yang bersangkutan serta nama, alamat dan nomor telepon bagian publikasi sehingga redaktur dapat menghubunginya

untuk informasi yang lebih jelas (Moore, 2005).

Hal ini berbeda dengan praktek yang dijalankan oleh humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika biasanya *press release* dikirimkan kepada redaktur media massa dan mengikuti pola penulisan berita sama dengan yang disusun oleh wartawan, maka pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas sebagai reporter menyusun *press release* tanpa mengikuti pola penulisan berita yang sesuai dengan praktek jurnalistik yang sudah baku (Badaruddin, 2014).

Ukuran ketiga adalah pengetahuan mengenai nilai berita. Berdasarkan teori jurnalistik, nilai berita yang mendasari pelaporan kisah berita meliputi aktualitas, kedekatan, keterkenalan, dampak dan humas interest. Sesuai dengan hasil wawancara, unsur nilai berita yang umum digunakan oleh pegawai humas adalah keterkenalan. Keterkenalan dalam bahasa jurnalistik dikenal dengan istilah *personages make news* atau pegawai humas istilahkan sebagai *people news*. Unsur-unsur lain yang menjadikan sebuah peristiwa layak untuk diberitakan tidak terlalu diperhatikan oleh mereka.

Kurangnya pengetahuan pegawai humas pada teknik penulisan siaran berita mempengaruhi kualitas berita yang mereka kirim kepada media massa. Hal ini juga mempengaruhi penggunaan bahasa jurnalistik yang disyaratkan harus singkat, padat, sederhana dan jelas (Cutlip, *et. al.*, 2009), yang artinya, sebuah berita seharusnya disusun dengan tata bahasa yang sederhana dan menggunakan kata-kata lazim yang umum dikenal masyarakat sehingga dapat diserap dengan sekilas baca atau sekilas dengar.

Pengetahuan pegawai humas mengenai kategori kelima yaitu kategori berita dan karakteristik media. Menurut Moore (2005), pemilihan media massa yang sesuai adalah

esensial untuk persiapan dan penyebaran siaran berita. Pelaksanaan pengiriman berita dan artikel tanpa membedakan media dan tanpa pengetahuan mengenai isi redaksional, khalayak dan kebijakan redaksional media tersebut, adalah percuma saja. Metode *shotgun* dalam mendistribusikan publisitas adalah salah satu dari begitu banyak praktek yang tidak efektif dalam humas.

Terkait kategori berita dan karakteristik media, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada umumnya siaran berita yang ditulis oleh pegawai humas tidak dibedakan berdasarkan kategori media dan karakteristik media (metode *shot gun*), dengan alasan bahwa siaran berita tersebut diberitakan atau tidak tergantung pada masing-masing media. Penjelasan tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, yang sangat jelas menunjukkan bahwa kepala humas belum memahami inti dari aktivitasnya sebagai pelaksana kegiatan humas dalam kaitannya dengan kegiatan publisitas.

Kategori lainnya yang menjadi tolak ukur adalah pengetahuan mengenai foto jurnalistik dan kode etik media. Menurut Gani dan Kusumalestari (2013), foto berita berhubungan dengan keaktualan karena dapat menentukan nilai beritanya, semakin aktual suatu berita, semakin tinggi nilai beritanya. Pengetahuan fotografer humas mengenai foto jurnalistik dan teknik fotografi untuk keperluan berita, berdasarkan hasil penelitian, terbatas pada keperluan dokumentasi untuk seluruh agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Foto yang dihasilkan umumnya berupa foto penandatanganan, pelantikan, peresmian, penyambutan dan rapat, yang sebenarnya tidak menarik untuk dimuat di media massa.

Dalam Teori Kendali Organisasi (Littlejohn dan Foss, 2011), pegawai yang bertugas sebagai fotografer, bekerja dibawah kendali

teknis (*technical control*) melalui penggunaan alat-alat dan teknologi. Hal ini dikarenakan masing-masing fotografer diberi kamera untuk digunakan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, yang dalam teori ini fotografer humas yang dikontrol oleh penggunaan kamera dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dikenal sebagai kendali teknis.

Kategori terakhir dalam mengukur pengetahuan jurnalistik humas adalah pengetahuan mengenai kode etik media. Kode etik media penting diketahui oleh pegawai humas khususnya mengenai prinsip jurnalistik dalam menjalankan kegiatan publisitas, menyelenggarakan kegiatan dengan bekerjasama dengan lembaga penyiaran, hal-hal yang berkenaan dengan embargo, *off the record*, hak koreksi dan hak jawab (Iriantara, 2005). Secara umum, pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalin hubungan dengan media massa tidak terlalu memperhatikan kode etik media. Hal ini dikarenakan hubungan humas dengan media massa lebih bersifat personal, dimana hubungan yang terjalin adalah antara pegawai humas dengan wartawan, sehingga hal-hal lain yang menyangkut hubungan humas dengan media massa kurang diperhatikan.

Sebagai petugas yang melakukan komunikasi dengan media, artinya mereka berperan sebagai teknisi komunikasi (*communication technician*), kemampuan jurnalistik dan komunikasi menjadi syarat utama. Menurut Teori Sekumpulan Aksi (*Action Assembly Theory*), hal ini disebut *procedural knowledge* yang menjelaskan bahwa kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu sesuai prosedur dan tidak bekerja tanpa mempertimbangkan pengetahuan dan prosedur (Littlejohn dan Foss, 2011).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pegawai humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menghasilkan publisitas yang layak di muat di media massa, masih kurang memiliki penguasaan dalam hal keahlian dan pengetahuan di bidang jurnalistik. Ukuran yang digunakan meliputi kualifikasi pendidikan, kemampuan menulis berita, pemahaman mengenai nilai berita, pengetahuan mengenai bahasa jurnalistik, pengetahuan mengenai kategori media dan karakteristik media, pengetahuan mengenai foto jurnalistik dan pengetahuan mengenai kode etik media.

Sebagai saran dalam penelitian ini, diharapkan pegawai yang ditunjuk sebagai kepala humas adalah pegawai yang menguasai pengetahuan kehumasan dan jurnalistik, dan memiliki keahlian di bidang jurnalistik sehingga mampu menjalankan aktivitas kehumasan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ulang agar posisi kehumasan di lingkungan pemerintah dipandang sebagai jabatan fungsional dan bukan lagi menduduki jabatan struktural. Disarankan pula perlunya dilakukan pelatihan jurnalistik dan kehumasan kepada pegawai humas demi mensukseskan kegiatan-kegiatan humas yang seharusnya dijalankan.

DAFTAR RUJUKAN

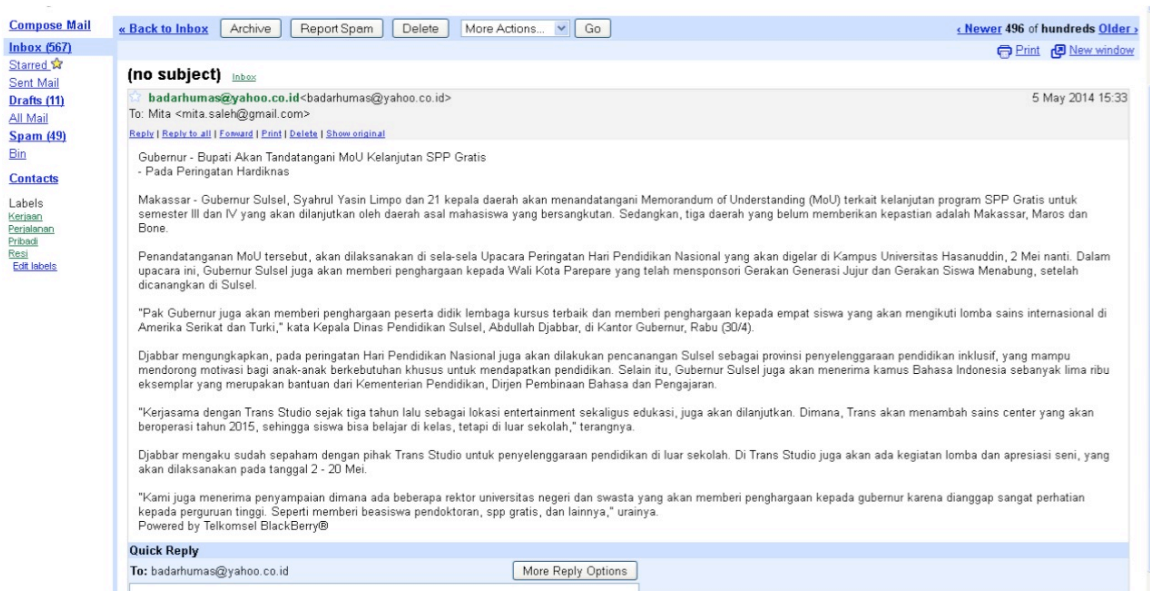
- Badaruddin. (2014). *Gubernur – Bupati Akan Tandatangani MoU Kelanjutan SPP Gratis Pada Peringatan Hardiknas*. Diakses 3 Agustus 2014. Available from : mita.saleh@gmail.com.
- Cutlip, Scott M., Center, Allen H., & Broom, Glen M. (2009). *Effective Public Relations*. Alih Bahasa Tri Wibowo. Kencana. Jakarta.

- Effendy, Onong Uchjana. (2002). *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Gani, Rita & Kusumalestari, Ratri Rizki. (2013). *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*. Simbiosis. Bandung.
- Iriantara, Yosol. (2005). *Media Relations: Konsep, Pendekatan dan Praktik*. Simbiosis. Bandung.
- Kusumaningrat, Hikmat. & Kusumaningrat, Purnama. (2007). *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Littlejohn, Stephen. W. & Foss, Karen. A. (2011). *Teori Komunikasi*. Alih Bahasa Mohammad Yusuf Hamdan. Salemba Humanika. Jakarta.
- Lubis, Evawani Elysa. (2012). Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 12(1): 1-73.
- Moore, Frazier. (2005). *Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Santana, K. Septiawan. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Tabel 1. Kualifikasi pendidikan pegawai humas

No	Nama Pegawai	Tugas	Pendidikan
1	Andi Darmawan Bintang	Kepala Biro Humas dan Protokol	S1 Teknik Sipil
2	Devo Khadafi	Kepala Bagian Humas	S1 Ilmu Ekonomi
3	Amrullah Hanafie	Reporter Wakil Gubernur	S1 Ilmu Komunikasi
4	Badaruddin	Reporter Gubernur	S1 Ilmu Komunikasi
5	Kamaruddin	Koordinator Fotografer	S1 Ilmu Administrasi
6	Abdillah Junaedi	Fotografer Wakil Gubernur	S1 Teknik Elektro
7	Ibrahim Halim	Reporter Gubernur	S1 Peternakan
8	Muh. Yatim	Fotografer Gubernur	-
9	Nur Achmad	Kameraman	-
10	Raden Muh, Alfateh	Fotografer Gubernur	S1 Ilmu Politik
11	Ashar Rahman T	Fotografer Gubernur	S1 Teknik Elektro
12	Muh. Herman	Fotografer Wakil Gubernur	-
13	Jenny Frans Pongrangga	Fotografer Sekretaris Daerah	S1 Ilmu Komunikasi

Sumber : Data hasil wawancara, 2014



Sumber : E-mail pribadi (mita.saleh@gmail.com)

Gambar 1. Press release